



LAPORAN ISU HOAKS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



31 MARET 2024

1. [HOAKS] Whatsapp Mengatasnamakan Kepala BPSDMD Jateng



Penjelasan :

Kepada Seluruh Sobat Bangkom Di Jawa Tengah. Harap Berhati Hati ya Dengan Modus Penipuan Yang Mengatasnamakan Bp Dr, SADIMIN, S. Pd, M. Eng, Kepala BPSDMD Prov Jateng, Dengan Nomer Telp/wa : 085277110457. Mohon Meningkatkan Kewaspadaan Pada Modus - Modus Penipuan Sejenis Ini. #asnberakhlak #hoax

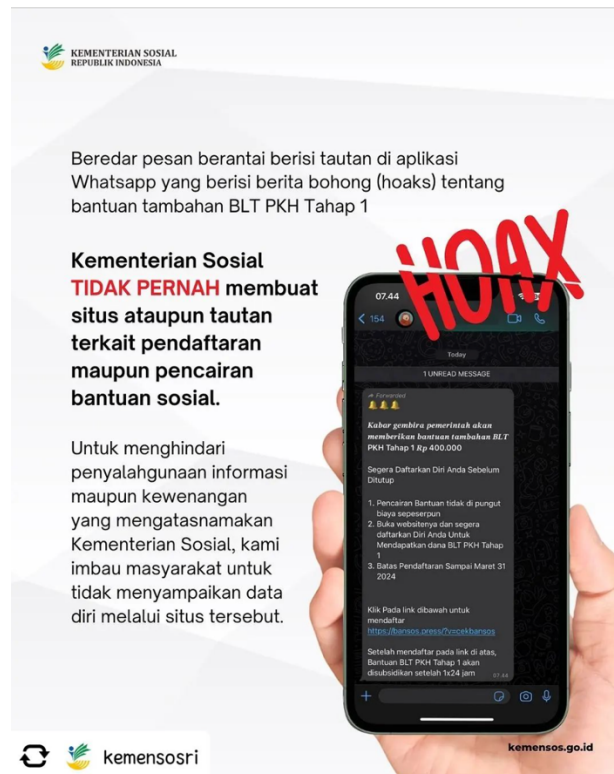
Sumber :

<https://www.instagram.com/p/C5Kf6amxJ1E/?igsh=bnBuY3R4ZXY1c3Fk>



27 MARET 2024

2. [HOAKS] Link Pendaftaran Maupun Pencarian Bantuan Sosial



Penjelasan :

#REPOST @kemensosri Baru-baru ini beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp terkait pencairan atau pendaftaran tambahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH Tahap 1. Berhenti menyebarkan atau memberikan data apapun melalui nomor tersebut. Mari saring sebelum sharing ya #SobatSosial! 📞 Layanan Pusat Kendali Kemensos 171 #BersatuLawanHoaks #Kemensos

Sumber :

https://www.instagram.com/p/C4-hg_VR89s/

27 MARET 2024

3. [HOAKS] Whatsapp Mengatasnamakan Sekda Jateng



Penjelasan :

Repost @ppid_jateng Kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, harap berhati-hati ya dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Sumarno, SE. MM Sekda Provinsi Jawa Tengah dengan nomor telp/wa 085649108943 Mohon meningkatkan kewaspadaan pada modus-modus penipuan sejenis ini.

Sumber :

<https://www.instagram.com/p/C4-Aw0OJ6TZ/?igsh=MTRzc2FwenlsdDZ2dg%3D%3D>

24 MARET 2024

4. [HOAKS] Tautan Pendaftaran BLT PKH Tambahan



Penjelasan :

Beredar pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhatsApp berisi tautan untuk melakukan pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) tambahan sebesar Rp400.000. Pendaftar diminta untuk mendaftarkan data pribadi ke tautan tersebut agar bisa mendapatkan BLT PKH tambahan secara langsung. Faktanya, tautan tersebut merupakan penipuan. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Masyarakat diimbau agar tidak memberikan informasi apa pun terkait informasi pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Untuk mengecek penerima bantuan, masyarakat bisa mengakses melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id, dengan memasukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta memasukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55512/hoaks-tautan-pendaftaran-blt-pkh-tambahan/0/laporan_isu_hoaks

18 MARET 2024

5. [HOAKS] Presiden Jokowi Perintahkan Menangkap Pendemo Pemilu 2024



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berpidato dan sejumlah orang yang tengah melakukan aksi demonstrasi. Dalam unggahan video tersebut terdengar Presiden Jokowi mengatakan kepada seluruh Kapolda, Kapolres, jajaran Polres, dan Polsek semuanya untuk kejar 'mereka', tangkap 'mereka', hajar 'mereka', hantam 'mereka', kalau undang-undang memperbolehkan dor 'mereka'. Unggahan video tersebut juga disertai dengan narasi "gk akan ada demo kl sudah jurdil, apakah layak seorang pemimpin bangsa berbicara dengan penuh ancaman pada rakyatnya?!?!?!?!". Faktanya, video Presiden Joko Widodo yang sedang berpidato tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang juga ditayangkan pada video. Klaim narasi pada unggahan tersebut juga tidak benar. Dikutip dari situs turnbackhoax.id, video tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Video serupa ditemukan pada kanal YouTube milik Kementerian Sekretariat Negara yang berjudul "Presiden Jokowi: Kejar Pengedar Narkoba! Tangkap! atau Bahkan di Dor Saja!" yang telah diunggah pada 27 Juni 2016 lalu. Video itu memperlihatkan Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional, di kawasan Kota Tua, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta agar aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional mengambil langkah tegas terhadap pengedar narkoba.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55361/hoaks-presiden-jokowi-perintahkan-menangkap-pendemo-pemilu-2024/0/laporan_isu_hoaks

14 MARET 2024

6. [HOAKS] 158 Rumah Di Boyolali Diterjang Angin Puting Beliung 13 Februari 2024



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa terjadi bencana alam angin puting beliung pada 13 Februari 2024 di Boyolali. Video tersebut juga mengklaim bahwa sebanyak 158 rumah diterjang angin puting beliung hingga hancur dan juga menyertakan narasi "BOYOLALI TERGULUNG, PUTING BELIUNG LANDA 158 RUMAH HINGGA HANCUR REMUK". Dilansir dari turnbackhoax.id, narator dalam video hanya membacakan artikel yang termuat di laman radarsolo.jawapos.com berjudul "Boyolali Berduka: Dilanda Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung". Dalam artikel tersebut tidak dijelaskan bahwa terjadi angin puting beliung yang menerjang 158 rumah di Boyolali. Sementara itu, ternyata fenomena tersebut terjadi pada 10 Maret 2024. Angin kencang yang melanda menyebabkan kerusakan rumah milik salah satu warga setempat. Puting beliung juga terjadi di Dusun Sugih Waras, Desa Jlareng, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali. Dengan demikian informasi pada unggahan video tersebut adalah tidak benar atau konten menyesatkan.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55327/hoaks-158-rumah-di-boyolali-diterjang-angin-puting-beliung-13-februari-2024/0/laporan_isu_hoaks

7. [HOAKS] Alun-Alun di Kabupaten Blora Rusak Diterjang Angin Puting Beliung



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa bencana angin puting beliung telah menghancurkan alun-alun dan sebuah stadion di Kabupaten Blora. Unggahan tersebut bertuliskan "Ambruk... BLOLA BERHAMBURAN,PUTING BELIUNG TERJANG ALUN ALUN BLORA HINGGA RINGSEK". Faktanya, klaim yang beredar tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, narator dalam video tersebut membacakan artikel radarbojonegoro.jawapos.com yang berjudul "23 Rumah di Kecamatan Kedungtuban Blora Rusak Akibat Diterjang Puting Beliung" pada tanggal 26 Februari 2024 lalu. Hingga kini, tidak ditemukan informasi yang mengklaim bahwa angin puting beliung menghancurkan alun-alun dan stadion di Kabupaten Blora.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55265/hoaks-alun-alun-di-kabupaten-blora-rusak-diterjang-angin-puting-beliung/0/laporan_isu_hoaks

4 MARET 2024

8. [HOAKS] Penetapan Hasil Pemilu 2024 Dimajukan Menjadi 28 Februari 2024

KPU mau berbuat licik dengan memajukan jadwal penetapan hasil pemilu 2024 pada tanggal 28 February 2024 , yang seharusnya di tetapkan pada tanggal 20 Maret 2024 ...

KPU sangat ketakutan dengan demo 1 Maret 2024 dan hak angket ...
Makanya penetapan hasil pemilu 2024 dimajukan ...

Parah !! 🤔👎



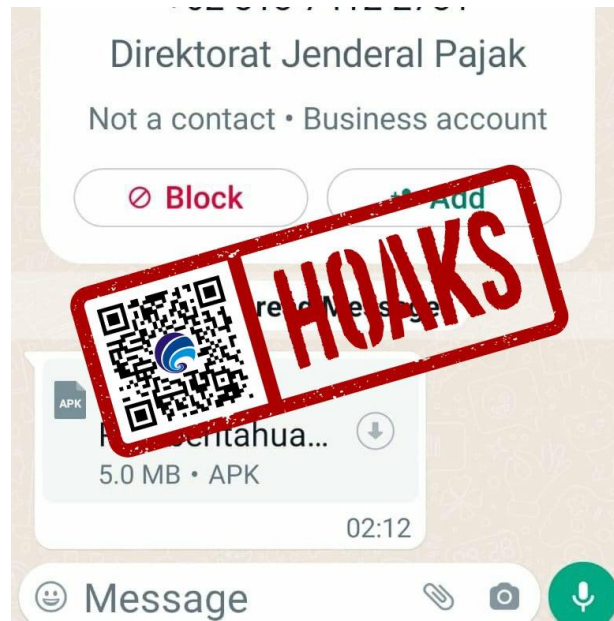
Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook yang berisi jadwal pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Unggahan poster tersebut dilengkapi narasi dengan klaim bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbuat curang dengan memajukan jadwal penetapan hasil Pemilu 2024 pada 28 Februari 2024 yang seharusnya ditetapkan pada 20 Maret 2024. Faktanya, klaim dalam unggahan poster tersebut adalah keliru. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, jadwal penetapan rekapitulasi nasional tidak mengalami perubahan atau dimajukan menjadi tanggal 28 Februari 2024. Pada tanggal itu, KPU hanya memulai proses rekapitulasi perhitungan suara secara nasional dan penetapan hasil Pemilu 2024. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa rekapitulasi akan berjalan hingga 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil Pemilu serentak tahun 2024.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55131/hoaks-penetapan-hasil-pemilu-2024-dimajukan-menjadi-28-februari-2024/0/laporan_isu_hoaks

9. [HOAKS] Pesan WhatsApp Surat Pemberitahuan Pajak Mengatasnamakan DJP



Penjelasan :

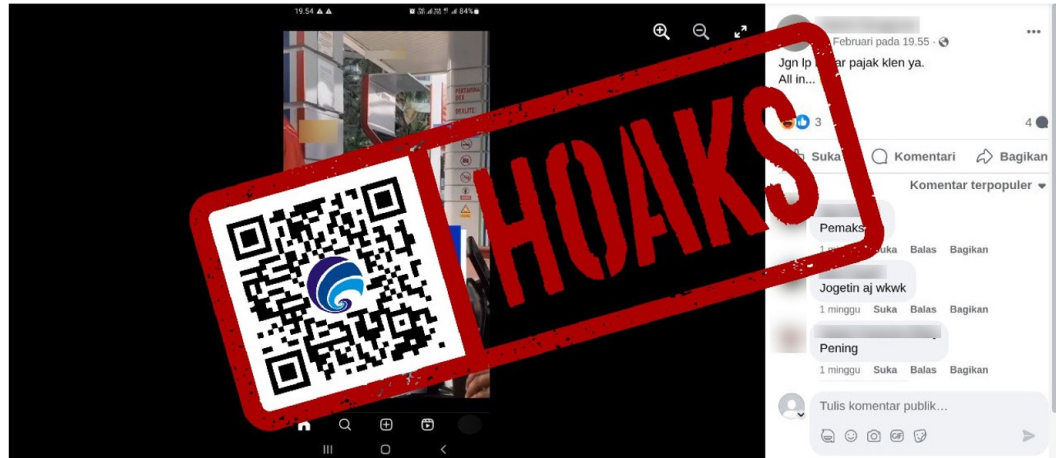
Beredar sebuah pesan pada platform WhatsApp yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berisi lampiran Surat Pemberitahuan Pajak berekstensi Android Package Kit (APK). Dilansir dari balipuspanews.com, pesan WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menyampaikan bahwa apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi APK dan mengatasnamakan DJP harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi APK. Adapun bentuk penipuan yang mengatasnamakan DJP tidak hanya melalui e-mail, melainkan juga melalui media lain seperti phishing situs resmi DJP, pengiriman file berekstensi APK lewat aplikasi WhatsApp, e-mail berisi imbauan pelunasan tagihan pajak, dan melalui modus lainnya.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55121/hoaks-pesan-whatsapp-surat-pemberitahuan-pajak-mengatasnamakan-djp/0/laporan_isu_hoaks

1 MARET 2024

10. [HOAKS] Larangan Beli BBM Bersubsidi jika Telat Bayar Pajak



Penjelasan :

Telah beredar unggahan informasi di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor tidak dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Unggahan tersebut disertai narasi "Peraturan Baru: Dilarang bayar bensin kalau telat bayar pajak". Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Adapun pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). Hal senada juga disampaikan Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi. Beliau menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/55104/hoaks-larangan-beli-bbm-bersubsidi-jika-telat-bayar-pajak/0/laporan_isu_hoaks